



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA **KERJA**

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. dkukmpp@balangankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 050.24/036 /SK/DKUKMPP-BLG/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program dan kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Kepala Dinas,


H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 050.24/ /SK/DKUKMPP-BLG/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat diselesaikan dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Nomor : 050.24/036/SK/DKUKMPP-BLG/2022 pada tanggal 11 Agustus 2023.

Dalam rangka untuk menunjang visi misi Bupati/Wakil Bupati Balangan tahun 2021-2026 yaitu "**Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera**". Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja ini agar dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023.

Harapannya, semoga penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Kabupaten Balangan.

Paringin, 11 Agustus 2023
Kepala Dinas, 



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2022.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	67
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	52
4.1 Analisa Sosial Ekonomi	52
4.2 Program dan Kegiatan.....	57
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Triwulan II Tahun 2022	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	29
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Balangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	45
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Perubahan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2023 dengan fokus utama adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan sampai dengan semester satu pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja tahun 2023. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan penganggaran daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- b. Perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan maupun antar jenis belanja serta perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran kegiatan;
- c. Adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan tahun 2023 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja tahun 2023. Hal ini agar konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan pencapaian visi dan misi lebih efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program satuan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2023. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2023 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. **PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II. **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- BAB IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
 - 4.1 Analisa Sosial Ekonomi
 - 4.2 Program dan Kegiatan

- BAB V. **PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikator s/d Triwulan II Tahun 2023

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Balangan pada tahun 2023 secara keseluruhan melaksanakan 14 Program, 12 Program termasuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja dari keberhasilan/kegagalan program tersebut. Secara keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan telah menetapkan kelompok indikator kinerja untuk masing-masing program tersebut, walaupun untuk beberapa program indikator kinerja *outcome*-nya belum seluruhnya dapat diukur tingkat capaiannya, sehingga ada beberapa program yang menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, Indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan s/d Trivulan II Tahun 2023

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT)	3	4	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKHAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				5	6	7= (5/4)		8 = (4 +6+6)	10 = (8/3)
1	2	3	4	5	6	7= (5/4)	8	9 = (4 +6+6)	10 = (8/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKUP PERANGKAT DAERAH	82.2	74.08	74.4	74.4	100.00	76.40	74.4	90.51
	PERSENTASE TEMUAN SPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	100	100	100	100.00	100	100	100
	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	95.2	77.04	87.96	87.96	100.00	88.36	87.96	92.10
Perencanaan, Pengarangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengarangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100.00	100	96	93
Penyusunan dokumen pencapaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14	1	2	2	100.00	3	6	42.88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Waktu realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Waktu realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Waktu realisasi kinerja SKPD (Laporan)	32	2	5	5	100.00	5	15	46.09

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) (KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRATRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RESTRATRA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RESTRATRA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RESTRATRA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		9 = (4 +6+8)	10 = (9+3)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9+3)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100,00	100	100	50	50
Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang memeriks gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Eolan)	3173	298	546	100,00	546	546	1267	30,87
Pelaksanaan Pertanggung jawaban dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	84	12	12	100,00	12	12	42	50
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100,00	100	100	50	50
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	50	4	5	100,00	5		9	18
Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100,00	100	100	50	50
Persediaan komponen instalasi isih/perancangan bangunan kantor	Jumlah pelat komponen instalasi isih/perancangan bangunan kantor yang disediakan (Pelat)	7	1	1	100,00	1	1	4	57,14

URUSAN/BIDANG URUSAN, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM (RESTRUKTURISASI DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-1) 3) T 1 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REKONSTRUKTURISASI TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET FENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REKONSTRUKTURISASI DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI REKONSTRUKTURISASI DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET FENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pembelian dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	36	12	4	4	100.00	6	19	54.29
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3						0	0
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Paket)	14	3	2	2	100.00	2	8	57.14
Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan yang disediakan (Dokumen)	21	3	3	3	100.00	3	12	57.14
Pengembangan model koordinasi dan komunikasi SPPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SPPD (Laporan)	7	1	1	1	100.00	1	4	57.14
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	300	100	100	103.00	100	99	99
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	19						0	0

URUSAN/BICANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELAJARAN S/D DEGAN TAHUN (N-3) T.H.2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH.2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJANA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH.2022	REALISASI RENJANA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH.2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 * (9/3)
1		2	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 ** (9/3)
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	5					8	9	17,65
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100,00	100	50	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	7	1	1	1	100,00	1	4	57,14
Penyediaan jasa pelayanan umum kantar	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantar yang disediakan (Laporan)	7	1	1	1	100,00	1	4	57,14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	100	100	100,00	100	50	50
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan diras atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan pemeliharaan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagawanya (Unit)	66	36	36	36	100,00	60	16	29,09
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100	14	9	9	100,00	36	56	56

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRATRA PERANGKAT AT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN TAHUN (N- 3) TH. 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REINJA PERANGKAT TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REINJA PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI REINJA PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondokung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3 4 5	4 1 1	5 6	6 7 = (6/5)	8 9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)	25 33.33	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF (%)	88	0	63.39	100.00	63.69	63.39	66.05	
Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi sipas pjsmanit smpun pljan koperasi yang wilayah keunggulannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Taat Peraturan (%)	34	0	32.35	100.00	28.17	32.39	55.25	
Pengawasan Kualitas, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggulan, serta Amanabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kualitas, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggulan, serta Amanabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12	0	6	100.00	6	8	5.0	

URUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM (RESTRATRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S/D DEGAN TAHUN (N- 3) T 4 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENGKA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIPAAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENGKA PERANGKA T DAERFAH TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI RENGKA PERANGKA T DAERAH TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		9 = (4 +5+8)	10 = (9+3)
1 Pemeriksaan Koperasi Koperasi baik adap Perekas Penandang-L ndangan Kawenangan Kabup danKota	2 Jumlah koperasi yang memenuhi Per unary Peranda yg-Udangan Kawenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	3 23	4 0	5 23	6 23	7 = (5/5) 100,00	8 23	9 = (4 +5+8) 19	10 = (9+3) 62,61
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengkawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/sda	Jumlah Koperasi yang tidak dilikuidasi Fomerksaan dan Pengkawasan (Unit Usaha)	26						0	0
PROGRAM PENCERIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI (%)	90	100	100	100	100,00	100	100	111,11
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota	Perentase Koperasi yang Menerima Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (%)	24	44,7	20,54	20,54	100,00	21,13	20,64	85,58
Pengaturan Pemasaran dan Pangusaha: Perkoperasian Serta Koperasi dan Koperasi GDM K/paris	Jumlah GDM Yang menaham Pengaturan Perkoperasian (Orang)	356	37	86	85	100,00	30	222	63,07
Pendidikan dan Pelatihan GDM Usaha Mikro dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Usaha Mikro yang Dilaksanakan (Kali)	2		2	2	100,00		2	100

URUSAN/IBDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REINTRA PERANGK DAERAH) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET FENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				5	6	7= (6/5)		9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kepekaan dan kompetensi SDM Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro (Orang)	60	4	50	60	7= (6/5) 100,00	8	9 = (4 +6+8) 60	10 = (9/3) 100
		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA (%)	80	53	80	80	100,00	65,00	60
Pembudayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, literasi, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENERAPKAN E- COMERCE (%)	0,25	0,14	0,14	0,14	100,00	0,15	0,14	90,87
	Persentase Usaha Mikro yang Memperoleh Fondiditah dan Pelatihan Usaha mikro (%)	0,4	0,25	0,27	0,27	100,00	0,37	0,27	87,6
	Persentase Pertumbuhan Usaha Baru (%)	4,3	3,2	2,5	3,5	100,00	3,70	3,5	81,40
	Persentase Usaha Mikro yang Bermitra (%)	0,25	0,14	0,14	0,14	100,00	0,15	0,14	58,80

URUSAN/IBIDANG UFUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH (N- TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH (N- TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
1 Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	2 Jumlah unit usaha yang produktif, bermisI tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan keberdayaan, pendataan manajemen, sambutan, dan resolusi/risasi usaha kegiatan kewiraan kub-papabuloks (Unit Usaha)	3 10904	4 6206	5 11030	6 11030	7 = (6/5) 100,00	8 10.904	9 = (4 +6+8) 11030	10 = (9/3) 101,16
Pembudayaan nilai kemitraan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro (Unit Usaha)	28	12	12	12	100,00	16	12	42,86
Pembudayaan keberdayaan potensi dan pengembangan Usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima peminatan dan pendampingan terhadap usaha mikro (Unit Usaha)	160					40	0	0
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar (Unit Usaha)	12017						11030	91,79
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSERTABE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTARIBAH (%)	0,75	2,53	0,53	0,53	100,00	4,38	0,53	72,88
Pengembangan usaha mikro dengan kriteria peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya meningkat (%)	1,91	2,53	0,53	0,53	100,00	4,38	0,53	62,38

URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DEGAN (N- TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REJENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJENJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJENJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3) 37,67
1	1	787	4	5	5	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)	
2	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pembangunan produksi dan pengalihan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	531	306	70	70	508	268	37,67	
3	Produksi dan Pengalihan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						0	0	
4	PERNYATAAN PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	30	0	0	0	0	0	0	
5	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	160	60	50	50	75	60	69	
6	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	27	1	6	6	3	10	37,04	
7	fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12	5	9	9	10	4	33,33	

URUSAN/IBICANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) T H 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3)
1	2	3	4	5	6	7= (6/5)	8	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Distribusi Perdagangan (Unit)	100		15	14	100.00	40.00	15	15
Pembiayaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Femilinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		1	1	100.00	1	1	20
Pembiayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Femilinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	5		1	1	100.00	1	1	20
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERBENTAS PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	100	0	0	0	0.00	30	0	0
Penyenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Milid Dagang bagi Produk Ekspor Unsurutan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	100	0	0	0	0.00	0	0	0

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRATRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) T-H 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REINJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	FERKIPAA REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REINJA PERANGKA T DAERAH (N- TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI REINJA PERANGKA T DAERAH (N- TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRATRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (5/6)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	15	0	0	0	0,00	7	0	0
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang disalurkan dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	15	0	0	0	0,00	12	10	66,67
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	15						0	0
Pemilihan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina (Pelaku Usaha)	3	0				3	1	33,33
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	25					0	0	0
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Ferdagangan (Rp/taun)	2.100.000.000		0	0	0,00	1.279.200.000	0	0
	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berjualita (%)	45,45		0	0	0,00	20,00	0	0
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail	10					10	12	120

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM WILAYAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN (RESTRATRIKSI) PERANGKAT AT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) T-1 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RESTRATRIKSI) T DAERAH TAHUN (N-1) TH 2023	PERKIPAAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRIKSI PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RESTRATRIKSI T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RESTRATRIKSI T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRATRIKSI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (5/6)	8 = (4 + 6 + 8)	9 = (7/8)	10 = (9/10)
Peringkasan Sistem dan Jaringan Informasi Percontohan	manajemen, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	1	4	1	6	7 = (5/6)	8 = (4 + 6 + 8)	9 = (7/8)	10 = (9/10)
Pelaksanaan Promosi Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Duta dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Percontohan (Colokan) Jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat Promosi Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35		1		100.00		1	100
Pemasaran dan Peningkatan Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh sertifikat pemasaran produk dalam negeri melalui pembinaan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	20						0	0
PROGRAM PERZIRAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSERTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SEBUTI DENGAN KETENTUAN (%)	20	6.42	9.04	9.04	100.00	12.00	9.04	40.2

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
	PERKETAH JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PEMIMPINAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI PENGERASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKUKAN (%)	100	0	0	0	0,00	0	0	0
Pembelian Isi Pengelapuan Pasar Rakyat, Pusat Perbaikan, dan Isi Ukaha Toko Swalayan	Jumlah Pembelian Isi Pengelapuan Pasar Rakyat, Pusat Perbaikan, dan Isi Usaha Toko Swalayan yang dikembalikan (Buluh)	80	0	0	0	0,00	10	0	0
Fasilitasi Penunahan Komitmen Perbaikan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbaikan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemerintahan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbaikan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	4	0	0	0	0,00	1	0	0
Pembelian Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pembelian Tanda Daftar Gudang (Buluh)	7	1					1	14,20

URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (REINSTRAL PERANGKAT ATAU DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA H1/SH PROGRAM DAN KELAJARAN KEGIATAN S/D DEWASA TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REINSTRAL PERANGKAT TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET REINSTRAL PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REINSTRAL PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI REINSTRAL PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET REINSTRAL (%)
1	2	3	4	5	6	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (8/3)	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Penggerak dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buah)	7	4	5	6	8	0	0	
Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Penggerak dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Dihasilkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	7					0	0	
Pengendalian Fasilitas Penyediaan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebaran Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyediaan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebaran Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	9					0	0	

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSITRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJIA PERANGKAT T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSITRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJIA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJIA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI CAPAIAN TARGET RENSITRA (%)
1 Peningkatan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Tertutup Penggunaan Alat Bahan Berbahaya (PA-BZ) maupun Produk BZ (P-BZ)	2 Jumlah Laporan Hasil Pengemasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor BZ, Pengguna Akar Bahan Berbahaya (PA-BZ) maupun Produk BZ (P-BZ) (Laporan)	3 0	4	5	6	8	0 = (4 + 6 x 8)	10 = (9/3)	0
Peningkatan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dibekukan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3 Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Bulan)	3					0	0	0
Kontribusi dan Sinergitas Layanan Penerbitan SKA	3 Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3					0	0	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUNJAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	6,8	7,85	6,1	6,1	7,60	3,87	55,91	

URUSAN/BICANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (RENTJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN (N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 ¹⁰⁰ (9/3)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 ¹⁰⁰ (9/3)
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	416	44	54	54	100,00	80	146	35,37
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	162	3	26	38	100,00	42	71	39,01
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12				0,00		0	0
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	64	12	12	12	100,00	12	30	46,43
Realisasian Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	7	1	1	1	100,00	1	4	57,14

URUSAN/IBIDANG URUSAN PEMERIKTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM (RENCANA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DEWANGAN TAHUN (N-3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJANA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	REALISASI RENJANA PERANGKAT DAERAH (N-2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL	84,61	81,53	69,23	66,23	100,00	81,53	69,23	81,82
	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	33,33	0	0	0	0,00	20,83	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kometrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Krang)	14	1	2	2	100,00	2	7	80
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) berjenis Tera Sah (Baah)	1500	1067	1105	1105	100,00	1.200	1105	73,67
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai kadaluarsa (Buah)	170	0	0	0	0,00	100	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya diawasi (Ulang)	1500	1067	1105	1105	100,00	1.200	7	0,47
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha diawasi metrologi legal yang dibina (Orang)	350	50	50	50	100,00	50	100	42,86

URUSAN/IBDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REJENJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3)
1	2	3	4	5	5	6	9 = (4 +6+8)	10 = (9/3)	
PROGRAM PEREMBAHAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENYERTA IKM YANG MEMERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	15	6,81	10	19	12,00	2,56	17,07	
Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan IKM	5	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	375	160	238	238	300	238	63,47	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3					0	0	
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan sarana pembangunan sarana dan prasarana distribusi (Dokumen)	7	1	1	1	1	4	57,14	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	2-18	-9,20	1,36	1,36	1,66	1,36	62,39	

URUSAN/BIKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PRC-GRAM DAN KELAJARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REKJA PERANGKA T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET FENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REKJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI REKJA PERANGKA T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7= (5/6)	8	9 = (4 + 8 + 8)	10 = (9/3)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Penuh Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kelembagaan Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IUM yang Memiliki Izn (IKM)	100	3	2	2	100.00	6	2	1.25
Facilitas Penerimaan Kondisi: Perolehan IUI, IPU, UKI dan PKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil audit verifikasi teknis pemeriksaan kesesuaian persyaratan teknis pelamar berusaha sektor Industri ditambah dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	4	1	1	1	100.00	1	4	100

URUSAN/IBDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SID DENGAN (N- TAHUN (N- 3) TH 2023	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANA PERANGKAT TAHUN N-1) TH 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN LALU (N-2)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN BERJALAN			
		5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + E + 8) D	10 = (9/3) 0		
1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pergeseran terhadap Permisian Berusaha, selain perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	2 Jumlah cakupan Laporan Verifikasi pemeriksaan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RPA, bagi Penanaman Modal Dalam Negari (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha berisiko yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + E + 8) D	10 = (9/3) 0

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN (N- 3) T-1 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJANA PERANGKAT TAHUN N-1) TH 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
		5	4	TARGET RENJANA PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	REALISASI RENJANA PERANGKAT TAHUN (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)	6	7 = (6/5)	8 = (4 + 6 + 8)
1 Fasilitasi verifikasi pemerintahan pelayanan/pembiayaan kegiatan usaha sektor produktifitas dalam rangka pemberian penyuluhan berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINISS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	2 Jumlah cakupan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan usaha usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab. Kota sepanjang menapak: Perumahan Mudal Dalam Negeri dan selain bidang usaha berbentuk yang menjadi kawasan/pemerintahan pusat (Dokumen)	3 7	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + 6 + 8)	10 = (9/3)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSEKUTUHAN SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	2,56	0,13	0,42	0,42	100,00	0,58	0,42	11,73
Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPIB, IUI, IUI, dan IPIB kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Peredaran Produk IKM (Rupiah)	294,48	231,37	282,787	282,757	100,30	283,187	282,738	85,82
	Jumlah Produk IKM Sensitifitas (IKM)	180	38	70	70	100,00	138	70	42,17

URUSAN/BIDANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRATRA PERANGKAT AT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI KINERJA PROGRAM HASIL DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N- 3) TH 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (REJANGKA PERANGKAT T DAERAH TAHUN N-1) TH 2023	FERKIRAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRATRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET REJANGKA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	REALISASI REJANGKA PERANGKAT T DAERAH (N- 2) TH 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) TAHUN 2023	10 = (9/3)
1	1	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (4 + E + 8)	10 = (9/3)
1	2	5	4	5	6	100,00	8	1	20
1	5	5	4	5	6	100,00	8	2	40

Pada Tabel 2.1 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan Belanja Daerah untuk tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.693.166.300,- atau 43.69% dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp. 15.321.375.470,- (APBD).

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran belum mencukupi kebutuhan/pengajuan anggaran dari Perangkat Daerah, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah tidak adanya mobil operasional serta penurunan masa manfaat kendaraan dinas jabatan kepala dinas dan sekretaris dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan kegiatan antara lain, koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, penyuluhan dan pembentukan koperasi, pembinaan, evaluasi dan monitoring yang mobilitasnya cukup tinggi selain itu mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ada yang telah melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi meskipun target yang ditetapkan dalam renstra ada yang telah tercapai akan tetapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan untuk terus menjaga agar tidak terjadi penurunan capaian kinerja untuk masing-masing Urusan Pemerintahan yang diampu oleh SKPD. Untuk lebih jelas terkait rincian pencapaian kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

2.2.1. Sebelum Penyesuaian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rp	Rp		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Persentase koperasi yang SHUnya meningkat			50.00	52.17	54.17	47.61	28.57	56.52	54.17	56.00				
Persentase usaha mikro yang hasil labanya meningkat			25.74	25.77	25.79	11.99	27.49	15.94	25.79	25.81				
Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian			1.98	1.98	1.99	1.98	1.90	1.29	1.99	2.00				
Kontribusi PDRB Sektor perdagangan, pengolahan dan jasa			6.10	6.30	6.40	5.97	5.50	3.84	6.40	6.50				

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Persentase koperasi yang berkualitas			2.00	3.00	4.00	2.72	5.45	11.61	4.00	13.00									
Persentase koperasi yang memperoleh pendidikan dan latihan perkoperasian			10.18	10.18	10.18	8.18	4.55	20.54	10.18	22.32									
Persentase usaha mikro yang labanya meningkat			27.00	28.00	29.00	26.64	27.49	15.94	29.00	30.00									
Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah			0.30	0.30	1.13	0.43	2.53	0.53	1.13	0.83									
Persentase peningkatan sapras			40.00	44.44	60.00	50.00	11.11	66.67	60.00	80.00									
Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi			15.00	26.00	29.05	15.00	15.01	33.95	29.05	59.00									

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi				Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	Tahun 2024		
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Persentase peningkatan jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga			20.00	25.00	27.00	20.00	0.00	66.67	27.00	70.00				
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			7.00	9.26	11.86	4.80	8.42	9.84	12.00	15.15				
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok			8.00	7.80	7.60	8.08	7.85	6.10	7.60	7.40				
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			76.00	77.00	78.00	74.00	70.50	75.69	76.00	79.00				

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis			
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
			Rp	4	Rp	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp		11		
1	2	3																			
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah			27.00	20.00	22.00		17.27	27.82	30.32											12	
Persentase IKM yang menerapkan Teknologi industri			10.00	10.00	10.00		4.10	6.81	10.00												
Persentase produk industri yang bersertifikat halal			6.79	7.75	8.71		5.83	5.09	9.14												
Profil IKM yang berkembang			0.19	0.38	0.58		0.00	0.13	0.42												

2.2.2. Setelah Penyesuaian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Persentase Koperasi Berpredikat Sehat (%)					8.45									8.45			8.45		
Persentase Usaha Mikro Naik Kelas (%)			0.15	0.15	0.16							0.15	0.15	0.16			0.18		
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			5.50	3.84	6.40	5.97						5.50	3.84	6.40			6.50		
Kontribusi PDRB Sektor Industri			1.90	1.29	1.99	1.98						1.90	1.29	1.99			2.00		
Persentase Koperasi Berkualitas (%)					7.04									7.04			50		
Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat (%)			25.74	25.77	25.79							25.74	25.77	25.79			25.81		
Peningkatan Volume Perdagangan (Miliar Rupiah)			671.41	751.05	791.2	640.39						671.41	751.05	791.2			831.35		

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi			Proyeksi			Catatan Analisis				
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		Tahun 2024	
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan			0.1440	0.0567	0.0480		0.1440	0.0567	0.0480	0.0549									
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkatkan					0.18					0.18	1.68								
Persentase Koperasi Aktif (%)				63.39	63.69				63.39	63.69	64.00								
Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Kompetensi Koperasi (%)			100	100	100		100	100		100	90.00								
Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha (%)			55.00	60.00	65.00		55.00	60.00		65.00	70.00								
Persentase Usaha Mikro yang			0.14	0.14	0.15		0.14	0.14		0.15	0.17								

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Menerapkan E-Comerce (%)																			
Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah (%)			2.53	0.53	4.38		2.53	0.53	4.38										
Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar (%)																			10.00
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor (%)					30.00										30.00				50.00
Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal (%)																			7.88
Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin			8.42	9.84	12.00	4.80	8.42	9.84	12.00	4.80									15.15

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi			Proyeksi			Catatan Analisis			
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2023			Tahun 2024		
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Sesuai Dengan Ketentuan (%)																		
Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan (%)																		
Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)			7.85	6.10	7.60	8.08	7.85	6.10	7.60	7.40								
Persentase Jumlah Kegiatan			61.53	69.23	61.53	46.15	61.53	69.23	61.53	69.23	69.23	61.53	61.53	69.23	69.23			

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi						Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Metrologi Legal Dilaksanakan (%)																		
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan (%)					20.83										20.83	25.00		
Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri (%)			6.81	10	12	4.10	6.81	10	12	13.00								
Persentase Pertumbuhan IKM (%)			5.81	1.36	1.68	5.81	-9.20	1.36	1.68	1.98								
Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang (%)			0.13	0.42	0.58		0.13	0.42	0.58	1.58								

Untuk Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Triwulan II tahun 2023 menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan hasil-hasil yang dicapai diantaranya melakukan pengawasan koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hasil pengawasan didapatkan yaitu jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT sampai dengan bulan Juni 2023 ada sebanyak 20 unit koperasi.

DAFTAR KOPERASI YANG SUDAH MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN 2023

No	Nama Koperasi	Pelaksanaan RAT
1	KPN BALANGAN	22 Januari 2023
2	KUD SIDO MUKTI	24 Januari 2023
3	KSU PULAWANIN MAKMUR SEJAHTERA	26 Januari 2023
4	KUD MAKARTI MANUNGGAL	27 Januari 2023
5	KPRI SANGGAM	12 Februari 2023
6	KPRI SEJAHTERA MANDIRI	22 Februari 2023
7	KOPDIT RANU WELUM	28 Februari 2023
8	KSU BALANGAN AGRO SEJAHTERA	7 Maret 2023
9	KSU RAGA BERSAMA	19 Maret 2023
10	KPRI PERPUSDA MAJU BERSAMA	21 Maret 2023
11	KUD RAWA SUBUR	24 Maret 2023
12	KSU KARTIKA JAYA	02 April 2023
13	KPN AL IKHLAS	9 Mei 2023
14	PRIMKOPPOL	8 Juni 2023
15	KSU MANTIMIN	19 Juni 2023
16	KSU SUNGAI KIHUNG LESTARI	23 Juni 2023
17	KOPBUN MAKMUR	24 Juni 2023
18	KOPDA FAJAR HARAPAN	25 Juni 2023
19	KUD KARYA BERSATU	26 Juni 2023
20	KSU MANUNTUNG	30 Juni 2023

Adapun untuk Jumlah Koperasi, dan UMKM sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Koperasi sebanyak 112 unit koperasi jumlah koperasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dimana Koperasi aktif sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah berjumlah 71 unit koperasi atau sebesar 63,39 % dan yang tidak aktif berjumlah 41 unit koperasi atau sebesar 36,61 %. Adapun kriteria koperasi aktif adalah :
 - a. Memiliki badan hukum.
 - b. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. Mempunyai/melaksanakan kegiatan usaha.
 - d. Tersusunnya laporan kegiatan dan rencana kerja bagi koperasi.

2. Jumlah UMKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berjumlah sebanyak 11.030 unit usaha. Dengan rincian Jumlah Usaha Mikro sebanyak 11.030 unit usaha, Usaha Kecil sebanyak 0 unit usaha dan Usaha Menengah sebanyak 0 unit usaha. Jumlah ini masih sama dengan Triwulan I dikarenakan proses Tahapan Pendataan UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2023 belum selesai di Triwulan II dan akan diselesaikan pada Triwulan III.

Kemudian juga telah melaksanakan pelatihan bagi Usaha Mikro berupa Desain dan Pengemasan Produk UMKM, diharapkan dengan pelatihan ini para pelaku UMKM dapat mendesain kemasan yang dapat menarik konsumen serta melakukan pengemasan produk dengan standar baik sehingga produk UMKM akan bertahan lebih lama.

Dalam rangka mendukung dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Nasional khususnya di Kabupaten Balangan, Dinas telah memberikan bantuan berupa Booth Kayu sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harapan mampu meningkatkan omzet para pelaku usaha mikro, dengan daftar penerima sebagai berikut:

**DAFTAR PELAKU USAHA MIKRO
YANG MENERIMA BANTUAN BOOTH KAYU**

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	SANIAH	Desa Timbun Tulang RT. 01	Pedagang Eceran
2	MUNAWARAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Pedagang
3	HELMA	Desa Timbun Tulang RT. 01	Pedagang Eceran
4	ZHOFIRAH	Desa Timbun Tulang RT. 01	Menjahit & Dagang
5	MUHAMMAD SYUHADA	Desa Timbun Tulang RT. 02	Service Elektronik dan Dagang
6	MUHIBAH	Desa Timbun Tulang RT. 02	Pedagang Eceran
7	RUSITA	Desa Timbun Tulang RT. 02	Kuliner
8	SAMSIANOR	Desa Timbun Tulang RT. 02	Pedagang Eceran
9	MAIMUNAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Pedagang Eceran
10	AISYAH	Desa Timbun Tulang RT. 03	Kuliner

Bidang Perindustrian telah melaksanakan pelatihan teknik industri berupa pelatihan pembuatan produk kemasan kepada 10 IKM, pelatihan pembuatan kue kepada 20 IKM, pelatihan ecoprint kepada 10 IKM dan pelatihan pembuatan pangan berbasis bahan lokal kepada 13 IKM. Selain itu juga telah melaksanakan kegiatan fasilitasi IKM dalam hal pendaftaran merk/haki kepada 10 IKM dan fasilitasi pendaftaran halal produk kepada 6 IKM.

Selain itu Bidang Perindustrian juga mengirimkan peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu, pelatihan animasi proses produksi Se-Kalimantan Selatan kepada 2 IKM, pelatihan penumbuhan WUB industri pangan (bahan pisang) kepada 25 IKM, pelatihan desain grafis kemasan Produk kepada 1 IKM dan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian aplikasi pendataan Bagi IKM kepada 2 IKM.

Adapun untuk Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah IKM sampai dengan triwulan II Tahun 2023 berjumlah sebanyak 2.361 unit usaha dengan seluruhnya adalah Industri Kecil.

Untuk Urusan Perdagangan pada sektor sarana dan prasarana perdagangan sampai dengan 30 Juni 2023 telah melaksanakan kegiatan pembersihan pasar, yaitu pasar halong, pasar paringin, pasar S.Lewan dan pasar modern, melaksanakan kegiatan relokasi dan penataan pedagang terminal sebanyak 28 orang pedagang ke area pasar paringin serta telah melaksanakan pembinaan pedagang pujasera kepada 55 pedagang yang telah direlokasi sebelumnya di pasar paringin.

Urusan Perdagangan pada sektor standardisasi, stabilitasi dan pengawasan perdagangan sampai dengan 30 Juni 2023 telah melaksanakan kegiatan pendataan harga bahan pokok dan barang penting sebanyak 15 kali di 4 (empat) pasar, yaitu Pasar Paringin, Pasar Adaro, Pasar Batumandi dan Pasar Bihara (sewaktu waktu) guna mengukur tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka penanganan inflasi di daerah telah dilaksanakan kegiatan menggelar pasar murah sebanyak 22 kali, yaitu pasar murah di Desa Mayanau Kecamatan Tebing Tinggi, pasar murah di Desa Sikontan Kecamatan Awayan, pasar murah di Desa Tanah Habang Kiri Kecamatan Lampihong, pasar murah di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Lapangan Martasura Kecamatan Paringin, pasar

murah di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, pasar murah di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Binjai Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai, pasar murah di Halaman Kantor Kecamatan Paringin Selatan (Sebanyak 3 (Tiga) Kali), pasar murah di Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai, pasar murah di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, pasar murah di Panggung Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi, pasar murah di Desa Pudak Kecamatan Paringin Selatan, pasar murah di Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin, pasar murah di Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi, pasar murah di Desa Hauwai Kecamatan Halong, pasar murah di Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin, pasar murah di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin, pasar murah di Halaman Kecamatan Paringin.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi saat ini sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SKPD kami, yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan yang kami hadapi sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga aparatur di masing-masing bidang sehingga pendataan/pemetaan terhadap pelaku usaha industri/usaha mikro/pedagang sebagai bahan informasi untuk pertumbuhan wirausaha baru sedikit terhambat.
2. Masih kurangnya produk lokal yang mampu bersaing dipasar global antara lain karena kemasan yang masih belum menarik/tradisional serta ketersediaan bahan baku yang kadang sulit di dapat dalam jumlah banyak untuk waktu yang singkat, sehingga membuat investor cenderung ragu untuk berinvestasi selain itu masih kurangnya promosi-promosi terhadap produk unggulan membuat produk unggulan tersebut kurang dikenal oleh masyarakat maupun calon investor.

3. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kedalam 2 (dua) program pemerintah daerah yaitu Program Sanggam Babungas dan Program Sanggam Bakabun sebagai upaya untuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro yang berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan sering sulit untuk berkembang.
4. Tidak adanya kendaraan mobil dinas operasional layak yang mendukung aktifitas kerja di lapangan.
5. Belum sepenuhnya mandiri dalam pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang ditahun ketiga renstra 2021-2026 di Kabupaten Balangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 segala kegiatan terkait metrologi legal (termasuk tera/tera ulang) dilaksanakan secara mandiri oleh tiap kabupaten/kota. Kabupaten Balangan belum dapat melaksanakan secara penuh kegiatan metrologi legal dikarenakan masih adanya peralatan yang belum dimiliki lengkap sebagai unit metrologi legal dan keterbatasan jumlah tenaga fungsional penera Kabupaten Balangan, yang masih memerlukan bantuan tenaga penera dari BSML dalam pelaksanaan tera/tera ulang di Kabupaten Balangan tahun ini.
6. Belum optimalnya pembinaan kepada pedagang dan pedagang masih melanggar aturan akan tata letak dagangan.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan perubahan renja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan kembali pengembangan dan pemasaran terhadap produk lokal unggulan daerah.
2. Perlu terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha (Usaha Mikro dan IKM) agar produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan serta mampu bersaing dipasar global.
3. Perlunya fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro.
4. Mendorong peningkatan kinerja koperasi agar mampu bersaing dengan perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
5. Perlunya pendataan pedagang yang lebih komprehensif sebagai data dasar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perdagangan.
6. Perlunya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
7. Perlunya kendaraan mobil dinas operasional lapangan.
8. Perlunya pendataan UTTP dan pengawasan perdagangan agar konsumen terlindungi.

Dari uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran pada tahun 2023, yaitu perluasan dan penguatan akses pemasaran produk usaha mikro, pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro/IKM, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, pembinaan dan penataan pegadang menjadi fokus untuk dilaksanakan.

Beberapa masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi ditahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Jumlah SDM pejabat fungsional pengawas koperasi dan penyuluh koperasi yang ada di daerah yang masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap seluruh koperasi yang ada.
3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi atau database usaha mikro yang tersedia.
4. Penerapan dan penguasaan teknologi masih sangat terbatas hal ini terlihat dari total 2.361 IKM, baru 238 IKM atau sebesar 10,08% yang sudah mendapatkan pelatihan teknologi industri dari total seluruh IKM. Hal ini berdampak kepada biaya produksi menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas.
5. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM pelaku usaha sehingga menghambat pertumbuhan nilai transaksi sektor perdagangan (volume perdagangan).

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global, legalitas dan peluang usaha koperasi, dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh koperasi dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi (data keragaan) dan usaha mikro (aplikasi sidumba).
3. Meningkatkan daya saing IKM dalam penerapan teknologi industri dan bantuan alat produksi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
5. Peningkatan nilai transaksi perdagangan (volume perdagangan).
6. Peningkatan perlindungan konsumen.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2023 beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Balangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokus	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	5 100	7 7,037,267,370	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	11 100	13 7,680,122,216	14
								NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	76.40 %		
								PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100 %		
								NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	86.30	Nilai IKM	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12	21,200,400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	12	Bulan	21,200,400
								Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10,170,400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	10,170,400
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	11,030,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	Laporan	11,030,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator/ (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Capaian Kinerja dan indikator realisasi SKPD		realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD			Capaian Kinerja dan indikator realisasi SKPD		realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD				
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	12	6.026,331,920	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	12	Bulan	6.526,071,666	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	5.817,859,920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	6.253,775,666	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	206,472,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	272,298,000	
III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Asn yang mengikuti pembinaan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	-	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Asn yang mengikuti pembinaan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	-	
								Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Masih Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	-	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	432.230,700	Administrasi Umum perangkat daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	892.564,000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	13.677,100	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	117.386,500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	116.336,800	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	2	Paket	32.894,500	Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Kab. Balangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	2	Paket	32.894,500	
9	Penyediaan bahan perundangan-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	8.267,700	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	8.267,700	
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	Laporan	260.004,900	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	Laporan	463.774,700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorial (Rp.)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			dan konsultasi SKPD					dan konsultasi SKPD				
V	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	80,109,200	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Bulan	57,779,200	
								Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketuntasan	100	%		
11	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Belitung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	80,109,200	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Belitung	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9	Unit	57,779,200	
VI	Penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah		Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	331,658,800	Penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah		Jumlah Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan	361,991,300	
								Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	%		
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Belitung	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	135,289,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Belitung	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	132,302,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	196,369,100	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan		229,689,100	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	146,736,350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan		229,615,650	
14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 Unit	123,815,750	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 Unit		198,595,050	
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170 Unit	21,920,600	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170 Unit		21,920,600	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	4 %	72,167,600	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS	4 %		72,167,600	
VIII	Pemeriksaan dan pengawasan		Jumlah Koperasi yang dilakukan	6 Koperasi	72,167,600	Pemeriksaan dan pengawasan		PERSENTASE KOPERASI AKTIF	63.69 %		72,167,600	
								Jumlah Koperasi yang dilakukan	28.17 Koperasi		72,167,600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	4 Pemeriksaan dan Pengawasan	5 6	7	8 koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9	10 Pemeriksaan dan Pengawasan	11 12	13	14
16	Pangawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit usaha	22.824.800	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Persentase Koperasi Taat Peraturan Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit usaha	22.824.800	
17	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Unit usaha	49.342.800	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Unit usaha	49.342.800	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.18 %	39.046.400	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		PERSENTASE KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.18 %	39.046.400	
								PERSENTASE PESERTA	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
IX	Pendidikan dan latihan perkerjasama bagi koperasi yang wilayah keranggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkerjasama yang dilaksanakan	2	39,045,400	Pendidikan dan latihan perkerjasama bagi koperasi yang wilayah keranggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkerjasama yang dilaksanakan	2	Kegiatan	39,045,400	
16	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkerjasama Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan	Jumlah SDM Yang memahami Penguasaan Perkerjasama	60	39,045,400	Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Perkerjasama Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkerjasama	21,13	%	39,045,400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT	29	433,370,400	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG LABANYA MENINGKAT	29	%	444,850,200	
								PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA	65,00	%		
								PERSENTASE USAHA MIKRO	0,15	%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, komitmen, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah Kegiatan Pendataan, Komitmen dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	6	Kegiatan	433,370,400	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, komitmen, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		YANG MENERAPKAN E-COMERCE Jumlah Kegiatan Pendataan, Komitmen dan Pelatihan Perijinan Usaha Mikro	5	Kegiatan	444,850,200	
19	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan pendataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi	11,567	Unit usaha	139,143,100	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Persentase Usaha Mikro yang Berperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Persentase Usaha Mikro yang Bermula Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, pendataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi	0,37 % 3,70 % 0,15 %	% % Unit usaha		142,542,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1			keberhasilan kabupet/et/kota									
20	Pemberdayaan melalui pembinaan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan komitmen usaha mikro	16	Unit usaha	86,584,200	Pemberdayaan melalui komitmen usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan komitmen usaha mikro	16	Unit usaha	94,564,200
21	Pemberdayaan, kelengkapan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha	207,643,100	Pemberdayaan kelengkapan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40	Unit usaha	207,643,100
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	1.13	%	993,259,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SKALA USAHANYA BERTAMBAH	4.38	%	2,074,138,700
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	127	UMKM	993,259,000	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah UKM yang skala usahanya meningkat	127	UMKM	2,074,138,700
22	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, serta Desain dan teknologi	157	Unit usaha	963,259,000	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Kab. Balangan	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	157	Unit usaha	2,074,138,700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	5 12	7 57,010,000	8 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9	10 PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	11 12 %	13 60,510,000	14
XI	Penerbitan Izin Pengeksporan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi dan perizinan yang dikeluarkan (Bh)	660	35,230,000	Penerbitan Izin Pengeksporan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		0	660	Buah	38,730,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	<p>Fasilitas Pemenuhan Kombinasi Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	Kab. Balangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kombinasi Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	35.233.000	Fasilitas Pemenuhan Kombinasi Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	Jumlah Penerbitan Izin Pengalihan Penerimaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang dikeluarkan	10	Buah	38.730.000	
XIII	<p>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</p>		Jumlah Pengusaha waralaba yang mempunyai Izin (Bh)	20	Buah	21.780.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Pengusaha waralaba yang mempunyai Izin (Bh)	20	Buah	21.780.000	
24	<p>Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau</p>	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda	30	Dokumen	21.780.000	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda	30	Dokumen	21.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cupaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cupaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Pendataan dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik		Pendataan dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik				
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	60 %	2,105,855,500	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		PERSENTASE PENINGKATAN SAPRAS	60 %		3,241,612,900	
XIV	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar (Bh)	1 Buah	1,876,461,500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pembangunan dan atau revitalisasi pasar (Bh)	1 Buah		3,005,218,900	
			Jumlah pasar yang dikelola (Bh)	4 Buah				Jumlah pasar yang dikelola (Bh)	4 Buah			
25	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	907,126,400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit		1,755,624,200	
26	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	969,335,100	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit		1,249,594,700	
XV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi		Persentase peningkatan	40 %	229,354,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi		Persentase peningkatan	40 %		236,384,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Cupaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Pengembangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		pedagang yang tertata				Pengembangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		pedagang yang tertata				
27	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	156,487,600	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	40,00	%		
28	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	72,905,400	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	159,987,600	
XVI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN KETERSEDIAAN HARGA BARANG POKOK (%)	7,6	%	421,864,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG POKOK DAN BARANG PENTING		PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG POKOK	7,60	%	564,145,600	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Penting Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	60	Kali	421,864,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Penting Di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60	Kali	564,145,600	
									Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	42	Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1												
29	Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Batangayan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	75,337,500	Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Batangayan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	101,437,300		14
30	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Batangayan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	346,526,500	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Batangayan	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	462,704,300		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI	29,05 %	2,205,017,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU USAHA SETELAH PROMOSI	29,05 %	2,419,079,800		
XVII	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi(Kali)	1 Kali	2,205,017,000	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan promosi	1 Kali	2,419,079,800		
								Presentase Peningkatan Tujuan Ekspor	0 %			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	10	Pelaku usaha	2,168,377,900	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	7	Orang		
32	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3	Pelaku usaha	36,639,100	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	3	Pelaku usaha	139,961,900	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PRODUK YANG DIPASARKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	27	%	133,810,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	27	%	137,310,000	
XVII	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	8	Kali	133,810,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pelaksanaan promosi dan pemasaran	8	Kali	137,310,000	
33	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Kab. Balangan	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri	10	UMKM	133,810,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Kab. Balangan	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL yang Berkualitas	10	UMKM	137,310,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Tingkat Kabupaten/Kota	3	4 melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 78	7 210,812,300	8 Tingkat Kabupaten/Kota	9	10 melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	11 78	12 217,792,200	14
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	%		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	%		
			ALAT - ALAT LUKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN NYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH	%				ALAT - ALAT LUKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN NYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH	%		
								PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	61.53		
								PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAJAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	20.83		
XIX	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1200	210,812,300	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat UTTP yang sudah ditera/tera ulang	1200	Buah	217,792,200

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cabatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
				5	6					7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah temuan barang tidak layak edar	80	Buah				Jumlah temuan barang tidak layak edar	80	Buah		
									Jumlah SDM K metrologian yang memperoleh sertifikasi teknis	2	Orang		
									Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sa	1200	Buah		
									Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	100	Buah		
34	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Uang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya di tera uang	1200	Unit	144.209.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Uang	Kab. Balangan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya di tera uang	1200	Unit	147.688.400	
35	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang di tera	50	Orang	66.602.700	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang di tera	50	Orang	70.102.600	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG BIENEFAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	10	%	448.141.800	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		PERSENTASE IKM YANG MEMERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	12.00	%	1.108.923.400	

No	Rancangan Awal RKFD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)				
1	XX	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1	Laporan	448,141,800	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		Jumlah penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	1,108,923,400		
36	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Belangen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	448,141,800	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Belangen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	1,108,923,400		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USANA INDUSTRI		PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	8,71	%	99,753,300	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USANA INDUSTRI		PERSENTASE PRODUK INDUSTRI YANG BERSERTIFIKAT HALAL	8,71	%	140,238,300		
XXI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan		Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	3	Kegiatan	99,753,300	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan		Jumlah kegiatan rekomendasi penerbitan izin usaha industri	3	Kegiatan	140,238,300		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
37	<p>Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	Kab. Bulangan	<p>Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS</p>	1	Dokumen	99,759,300	<p>Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IU, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	Kab. Bulangan	1	Dokumen	140,238,300	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		PROFIL IKM YANG BERKEMBANG	0.58	%	1,065,996,800	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		0.58	%	1,170,569,500	
									0.58	%		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	XXII Penyediaan informasi industri untuk industri IUI, IPU, IUK, dan IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Jumlah penyediaan informasi	1	Laporan	1,065,895,800	Penyediaan informasi industri untuk industri IUI, IPU, IUK, dan IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan informasi	1	Laporan	1,170,509,500		
38	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Sulang	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	124,250,800	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	Nilai Pemasaran Produk IKM Jumlah Produk IKM Bersertifikasi Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	263,187 135	Rupiah IKM	190,424,800		
39	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Sulang	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	941,765,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	990,164,700		
JUMLAH PAGU INDIKATIF											JUMLAH FAGU INDIKATIF		19,321,375,470	19,570,528,816

Paringin, 11 Agustus 2023

Kepala Dinas, 



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1963-10-01 199001 1 002



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini dapat bersumber dari usulan SKPD, dari masukan pihak legislatif (DPRD) maupun aspirasi dari masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan sebagai berikut :



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-IV (2019-2025) diarahkan untuk Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Secara garis besar arah pembangunan nasional Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui

percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam negara berpendapatan menengah.

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Perindustrian mempunyai target kinerja pembangunan yang difokuskan pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia industri dengan beberapa indikator seperti tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten, terselenggaranya pelatihan industri berbasis spesifikasi dan kompetensi, terfasilitasinya pengembangan Sumber Daya Manusia industri, terfasilitasinya sarana perdagangan serta penguatan infrastruktur kelembagaan, Sedangkan target kinerja pembangunan pada kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diprioritaskan pada peningkatan peran usaha mikro dan kecil dan koperasi dalam penanggulangan kemiskinan, dengan indikator, peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM, perluasan dan penguatan akses pemasaran bagi koperasi dan UMKM, serta perluasan KUR melalui program peningkatan daya saing UMKM. Selain itu pengembangan keanggotaan koperasi melalui penyuluhan dan kaderisasi melalui program penguatan kelembagaan koperasi.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan kami rencanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
2. Penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran.
3. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam menumbuhkan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

4. Penempatan/Penyertaan Modal Negara/Daerah dalam rangka mendukung program KUR.
5. Peningkatan kemampuan teknologi industri untuk mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami di tahun 2023 adalah fasilitasi pembentukan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pembinaan serta pendampingan IKM, peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha pedagang, peningkatan transaksi perdagangan (volume perdagangan), peningkatan perlindungan konsumen serta optimalisasi kualitas produk unggulan melalui pembinaan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidaklah terlepas dari tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yang mana tujuan tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun secara khusus tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa.
2. Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat.
3. Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat.
4. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran tersebut kami upayakan dalam rangka salah satu pencapaian sasaran Kabupaten Balangan yaitu Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa. Melalui pembinaan secara terus menerus terhadap Usaha Mikro, IKM, koperasi serta pedagang agar berdaya saing guna mendukung Misi 2 dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Analisa Sosial Ekonomi

Analisa dilakukan pada 3 urusan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Koperasi adalah sokoguru perekonomian bangsa Indonesia. Namun perkembangan perkoperasian dirasakan masih belum mencapai kondisi terbaiknya. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi, dimana setiap koperasi menghadapi permasalahannya masing-masing yang beragam dan berbeda dengan koperasi lainnya. Begitu juga dengan pengelolaan koperasi, masih banyak koperasi yang belum mampu mengelola manajemen perkoperasian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, dipandang perlu adanya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk kelembagaan koperasi, manajemen usaha ataupun manajemen operasional koperasi. Pemerintah memberikan akses yang luas kepada Koperasi untuk mengembangkan usahanya. Namun koperasi juga diberi batasan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh Koperasi. Kesemua itu dimaksudkan agar Koperasi benar-benar dapat membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan perkoperasian bagi para pegiat koperasi sehingga kapasitas dan kemampuan SDM Koperasi dapat ditingkatkan. Saat ini, kualitas kinerja kelembagaan koperasi dinilai masih rendah. Disamping itu,

regenerasi kepengurusan koperasi juga perlu disiapkan sebagai upaya menghadapi pergantian pengurus yang habis masa kepengurusannya. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memberikan kesempatan bagi SDM Koperasi untuk dapat menimba ilmu perkoperasian baik yang menyangkut pengelolaan manajemen usaha, keuangan ataupun operasional koperasi lainnya. Pengelolaan koperasi harus sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan perkoperasian dan turunannya.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Guna meningkatkan peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan, ketersediaan data pelaku UMKM menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi intervensi program agar tepat sasaran berdasarkan karakter, kebutuhan dan lokasi usaha. Data juga sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana intervensi yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas usaha. Data yang akurat, lengkap dan dinamis juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Salah satu strategi pemberdayaan usaha mikro yaitu melalui kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagai leading sector dalam pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memiliki mandat untuk mempersiapkan, melaksanakan dan mengelola basis data bagi UMKM. Untuk mewujudkan Database UMKM tersebut, perlu ada dilakukan kegiatan pendataan UMKM dan bertanggungjawab memberikan fasilitasi kemitraan usaha supaya UMKM lokal lebih maju dan berkembang.

d. Program Pengembangan UMKM

Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM melalui pemberian fasilitasi, bimbingan dan pendampingan. Dengan pemberian fasilitasi baik dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi maka UMKM berpotensi untuk dapat lebih meningkatkan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan untuk lebih meningkatkan perekonomian.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Melalui sosialisasi tata cara pengajuan permohonan surat rekomendasi dan atau fasilitasi permohonan perizinan elektronik terintegrasi berbasis resiko (OSS-RBA) untuk membantu masyarakat/pelaku usaha dalam mendapatkan surat keterangan izin usaha dan atau surat rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kegiatan pendataan waralaba informasi pelaku usaha kemitraan waralaba yang ada di Kabupaten Balangan dikumpulkan sebagai bahan awal bagi Dinas/Bidang/Instansi terkait untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba, melaksanakan pembinaan serta monitoring keberlangsungan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Balangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk menunjang peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar) melalui beberapa kegiatan yaitu, pembangunan sarana distribusi perdagangan, revitalisasi atau perbaikan sarana distribusi perdagangan, pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pemberdayaan dan pembinaan pengelola

sarana distribusi perdagangan serta penataan pedagang. Adapun dampak dan manfaat dari program, diantaranya :

Dengan melakukan pembangunan pasar atau revitalisasi pasar, akan dapat memperbanyak lapak/tempat pedagang yang dapat berjualan pada pasar tersebut. Melalui pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu pemeliharaan, pembersihan dan pengawasan sarana distribusi perdagangan, fasilitas sarana perdagangan yang telah ada dapat terpelihara dan tidak kumuh, nyaman saat berbelanja/bertransaksi serta kemudahan akses hingga tertatanya pedagang membuat pasar akan terlihat rapi. Pasar adalah salah satu titik penting dalam perekonomian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan tempat perputaran uang.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan yang dilakukan untuk menstabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga/inflasi di daerah dengan langkah nyata berupa pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam upaya membantu menjaga nilai daya beli masyarakat.

d. Program Pengembangan Ekspor

Memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan pemasaran produknya ke pasar yang lebih luas melalui pameran dagang yang dapat diikuti dan pelatihan ekspor. Program ini bertujuan menghimpun produk lokal dan unggulan daerah untuk dapat mempromosikan produknya. Diharapkan dapat membantu produk lokal dan unggulan daerah dalam mempromosikan dan memasarkan dengan difasilitasi untuk mengikuti pameran dagang dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan atau omset peserta pameran dagang serta menumbuhkan ekonomi kreatif.

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Guna memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan terjaminnya kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan serta memastikan kebenaran pengukuran/panakaran/penimbangan dengan perlindungan hukum dan keadilan transaksi agar dapat

meningkatkan saling kepercayaan dalam transaksi jual beli di masyarakat.

- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Memfasilitasi produk lokal dan unggulan daerah agar dapat masuk retail-retail modern guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan mengembangkan pemasaran produk lokal dan unggulan daerah yang dituangkan kedalam hubungan kerjasama (Mou) dengan retail modern.
3. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian
 - a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Perencanaan dan Pembangunan Industri melalui pelatihan IKM. Melalui pelatihan IKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan ketrampilan dalam proses produksi maupun peningkatan manajerial, IKM diajarkan untuk meningkatkan produktifitas produksi sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pelatihan tidak hanya diajarkan tentang operasional dan teknis namun IKM juga diberikan pengertian tentang teknologi terbaru yang dapat digunakan untuk efisiensi kerja.
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Pengendalian Izin Usaha Industri melalui sertifikasi halal gratis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan fasilitasi sistem jaminan halal (SJH) kepada IKM untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk olahannya. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal produk memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produk. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari konsumen, karena dengan adanya label halal produk, maka konsumen tidak merasa khawatir dengan kandungan pada produk. Kedua, dapat meningkatkan luas jangkauan pemasaran, kepercayaan konsumen yang baik dapat meningkatkan jangkauan pasar dari produk olahan. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ke daerah lain.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Dijaman era digitalisasi seperti sekarang banyak kebijakan pemerintah yang mengarah pada sistem pelayanan, perijinan dan pendataan secara online. Banyak para pelaku usaha Industri Kecil Menengah yang belum bisa melakukan secara mandiri, untuk menyikapi hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memberikan fasilitasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk memperoleh perijinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), memfasilitasi pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan Industri (SIMANIS) serta memfasilitasi pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan juga melakukan pendataan bagi para Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada diseluruh Kabupaten Balangan guna mempermudah untuk melakukan pembinaan dan mengukur tingkat produktivitas para IKM. Selain itu juga melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha agar mendapatkan pemahaman lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) Kabupaten Balangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berusaha mewujudkan Industri Kerajinan Balangan yang mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya unggulan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan hasil-hasil kerajinan IKM Balangan melalui partisipasi pameran-pameran baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain itu juga melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kreativitas para pengrajin sehingga mereka mampu berinovasi dan terus meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka.

4.2 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023.
3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

b. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Baiangan tahun 2021-2026. Pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja, penambahan atau pengurangan anggaran dan penambahan atau penghapusan kegiatan sebagai akibat dari perkembangan keadaan yang tidak sesuai.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.817.859.920,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 6.253.775.666,-

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 208.472.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 272.296.000,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 13.677.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 71.290.300,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 117.386.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 116.336.800,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 260.004.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 463.774.700,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 80.109.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 57.779.200,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 135.289.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 132.302.200,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 196.369.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 229.689.100,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum

perubahan Rp. 123.815.750,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 198.595.050,-

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 139.143.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 142.642.900,-
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 86.584.200,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 94.564.200,-
 - Program Pengembangan UMKM
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 993.259.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 2.074.138.700,-
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 35.230.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 38.730.000,-
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 907.126.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.755.624.200,-
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 969.335.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.249.594.700,-
- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 156.487.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 159.987.600,-
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 72.906.400,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 76.406.400,-
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 75.337.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 101.437.300,-
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 346.526.500,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 462.708.300,-
- Program Pengembangan Ekspor
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 2.168.377.900,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 2.279.517.900,-
 - Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 36.639.100,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 139.561.900,-
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 133.810.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 137.310.000,-
 - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 144.209.600,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 147.689.400,-
 - Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 66.602.700,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 70.102.800,-
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 446.141.800,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.108.923.400,-
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 99.758.300,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 140.238.300,-
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 124.230.800,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 180.424.800,-
 - Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 941.765.000,- dan sesudah perubahan menjadi Rp. 990.164.700,-

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum	Setelah	Bertambah/	Keterangan
			Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	(Berkurang) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7,037,267,370	7,880,122,216	842,854,846	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Balangan	21,200,400	21,200,400	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Kab. Balangan	10,170,400	10,170,400	-	
			11,030,000	11,030,000	-	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	6,026,331,920	6,526,071,666	499,739,746	
4	Pelaksanaan Peratausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Balangan	5,817,859,920	6,253,775,666	435,915,746	
III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		208,472,000	272,296,000	63,824,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	-	-	-	
IV	Administrasi Umum perangkat daerah					
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Balangan	432,230,700	692,564,000	260,333,300	
6	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Kab. Balangan	13,677,100	71,290,300	57,613,200	
7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Balangan	117,386,500	116,336,800	(1,049,700)	
			32,894,500	32,894,500	-	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5	(Rp)	6	
1	2	3							7
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Balangan		8.267,700		8.267,700			
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Balangan	260,004,900		463,774,700		203,769,800		
V	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		80,109,200		57,779,200		(22,330,000)		
10	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	50,109,200		57,779,200		(22,330,000)		
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		331,658,800		361,991,300		30,332,500		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	135,269,700		132,302,200		(2,987,500)		
12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Balangan	196,389,100		229,689,100		33,320,000		
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah		145,736,350		220,515,650		74,779,300		
13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Balangan	123,815,750		198,595,050		74,779,300		
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Balangan	21,920,600		21,920,600		-		
VIII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		72,167,600		72,167,600		-		
	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		72,167,600		72,167,600		-		
15	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Komandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kawenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	22,824,800		22,824,800		-		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5	(Rp)	6	
1	2	3							7
16	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Balangan		49,342,800		49,342,800			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN								
IX	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ kota			39,046,400		39,046,400			
17	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Balangan		39,046,400		39,046,400			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
X	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan			433,370,400		444,350,200		11,479,800	
18	Pandataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan		139,143,100		142,642,900		3,499,800	
19	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kab. Balangan		66,584,200		94,564,200		7,980,000	
20	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kab. Balangan		207,643,100		207,643,100			
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
XI	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil			993,259,000		2,074,138,700		1,080,879,700	
21	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengotahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Kab. Balangan		993,259,000		2,074,138,700		1,080,879,700	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang		Keterangan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
XII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		57,010,000	60,510,000	3,500,000				
22	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Barusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Balangan	35,230,000	38,730,000	3,500,000				
XIII	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		21,780,000	21,780,000	-				
23	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Balangan	21,780,000	21,780,000	-				
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
XIV	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		2,105,855,500	3,241,612,900	1,135,757,400				
24	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	1,876,461,500	3,005,218,900	1,128,757,400				
25	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	907,126,400	1,755,624,200	848,497,800				
XV	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		969,335,100	1,249,594,700	280,259,600				
26	Pambinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	229,394,000	236,394,000	7,000,000				
27	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Balangan	156,487,600	159,987,600	3,500,000				
			72,906,400	76,406,400	3,500,000				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5	(Rp)	6	
1	2	3						7	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
XVI	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		421,864,000		564,145,600		142,281,600		
28	Pantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Balangan	75,337,500		101,437,300		25,099,800		
29	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	346,526,500		462,708,300		116,181,800		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
XVII	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Eagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2,205,017,000		2,419,079,800		214,062,800		
30	Pameran Dagang Nasional	Kab. Balangan							
31	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Balangan	2,168,377,900		2,279,517,900		111,140,000		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
XVIII	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		133,810,000		137,310,000		3,500,000		
32	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Balangan	133,810,000		137,310,000		3,500,000		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
XIX			210,812,300		217,792,200		6,979,900		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5	(Rp)	6	
1	2	3							7
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		210,812,300		217,792,200		6,979,900		
33	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Balangan	144,209,600		147,989,400		3,479,800		
34	Pengawasan/Peryuluhan Metrologi Legal	Kab. Balangan	66,602,700		70,102,800		3,500,100		
XX	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota		446,141,800		1,108,923,400		662,781,600		
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Balangan	446,141,800		1,108,923,400		662,781,600		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
XXI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Nasional (SIINas)		99,758,300		140,238,300		40,480,000		
36	Facilities penunahan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten / kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	99,758,300		140,238,300		40,480,000		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang)		Keterangan
			(Rp)	4	(Rp)	5	(Rp)	6	
1	2	3							7
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
XXII	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		1,065,995,800		1,170,589,500		104,593,700		
37	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Balangan	1,065,995,800		1,170,589,500		104,593,700		
38	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Balangan	124,230,900		180,424,800		56,194,000		
			941,765,000		990,164,700		48,399,700		
	TOTAL		15,321,375,470		19,570,526,816		4,249,151,346		

BAB V PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2023 ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan. Rincian daftar program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2023 diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta tepat waktu. Selain *input* yang baik, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan kegiatan. *Input* dan *proses* akan memberikan *benefit* dan *impact* kepada *output* maupun *outcome*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu semua pihak terkait, khususnya jajaran aparat yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan petunjuk didalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggungjawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Balangan dalam Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera.

Kesadaran untuk secara terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja telah ditunjang dengan penganangan penerapan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Momentum ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam rangka *revitalisasi* diri maupun organisasi.

Paringin, 11 Agustus 2023
Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662
Telp. (0526) 2029523 Email. dkukmpp@balangankab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800/033 /SK/DKUKMPP-BLG/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyalapkan data sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
- e. melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;

g. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 10 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 800/ /SK/DKUKMPP-BLG/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	RIBOWO, S.Pd, M.AP NIP. 19661002 199001 1 002	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	HERLINA, S.Sos, MM NIP. 19701205 199603 2 003	Sekretaris Dinas	Ketua
3	SAHRIL, S.Kom NIP. 198511272010011014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	AKHMAD HAIRANI, S.Sos NIP. 19740205 200501 1 012	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
5	AMIRUL, S.Hut, M.P NIP. 19700823 199803 1 004	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Anggota
6	RIZA KURNIAWAN, S.STP, M.IP NIP. 19870328 200602 1 001	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
7	Hj. IDA ROSIYANTI, SE NIP. 19780620 200604 2 021	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
8	AHMAD BUHARI, A.Md NIP. 19750306 201001 1 010	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	ERWIN WAHYUNI, S.Sos NIP. 19811110 200701 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	AHMAD MISRANI, SE NIP. 19730619 200501 1 013	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
11	HAFIZUDDIN, S.Pd NIP. 19820515 200803 1 001	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
12	SUKMAWATI, SE NIP. 19840521 200501 2 005	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
13	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
14	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	Anggota
15	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
16	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
17	SUNTARI SRI REJEKI, ST, MT NIP. 19821019 200604 2 007	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
18	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
19	MAKMUR RAJABI, S.Sos NIP. 19800909 200701 1 016	Kepala UPT Pengelola Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 10 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd. M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661002 199001 1 002